

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, 2014, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar.
- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asmaeny Azis dan Izlindawati, 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Allan R.Bewer-Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press.
- Budiman B.Sagala, Tanpa Tahun, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Penerbit Yrama Widya.
- Dahlan Thaib, Jzim Hamidi, 2002, *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Dicey, A.V, 1971, *Introduction An Introduction to Study of the Law of Constitution*, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London.
- Geoffrey Marshall, 1971, *Constitutional Theory*, London, Oxford University Press.
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen, Eksitensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- H.W.R. Wade, 1984, *Administrative Law*, Oxford.
- Hamza Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismail Sunny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1985, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Cetakan Pertama.
- , 2015, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang.
- , 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- , 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- K.C. Wheare, 1975, *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia*, refreksi, Makassar.
- KRHN & LeIP, 1999, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, ICEI, Jakarta.
- KRHN & KEMITRAAN, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahakamah Konstitusi*, KRHN, Jakarta.

- La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, CV. Utomo.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Ull Press, Yogyakarta.
- Nurul Qamar et.al, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Editipn, Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak & Hukum Lingkungan*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Solly Lubis, 1985, *Hak-hak Asasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Padmo Wahjono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Edisi Kedua, Cetakan ke-6.
- Merryman, 1985, *The Civil Law*.
- Moh. Mahmud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta.
- P. de Haan, Th.G.Durksteen, R.Fernhout, 1986, *Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat*, Deel I, Kluwer-Devente.
- P.H. Collin, 2004, *Dictionary of Law, fourt edition*, Bloomsbury, London, England.
- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co..

- , 1986, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Cet-2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajahmada University Press Yogyakarta.
- , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Saldi Isra, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Raja Wali Pers, Depok.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1993, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Strong, C.F, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung.
- Syahruddin Nawi, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar.
- Soehino, 1985, *Hukum Tatat Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sir Ivor Jennings, 1966, *The Law and the Constitutions*, University of London Press, London.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L.Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

JURNAL-ARTIKEL

Abdul Hakim G. Nusantara. *Mahkamah Konstitusi: Prespektif Politik dan Hukum*, Kompas, 24 September 2002.

A.S.S. Tambunan, *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945, Suatu Studi analisis mengenai pengaturannya tahun 1966-1997* Disertai, Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta 1998.

Firmansyah Arifin, et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Karl-Georg Zierlein, “Judicial (Constitutional) Review by the German Federal Constitutional Court and Its Role in Protecting Human Rights”(Bundesverfassungsgericht Bibbliotheck KL/LG 487, Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe, 1997.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR.

Zweigert and Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, Vols I and 11, 1987.

Zweigert and Kotz, *An Introduction to Comparative law*, 2nd edn 1992; 3rd edn 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015.

WEBSITE

<http://en.wikipedia.org/wiki/>

<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/115/pdf>

<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/273/141>

[www.vfgh.gv.at.](http://www.vfgh.gv.at)

LAIN-LAIN

Materi kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara Andi Pangerang Moenta, tgl 20

April 2019